

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi secara etimologi berasal dari kata “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demokrasi adalah keadaan negara dimana sistem pemerintahannya, kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.¹

Didalam sistem politik dan pemerintahan yang sedang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi. Tentunya penerapan demokrasi di tiap-tiap negara pastilah berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya keragaman topografi sosial dan budaya yang ada. Namun dengan adanya perbedaan didalam penerapan model demokrasi tidak mengurangi substansi dari demokrasi itu sendiri yakni, penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap hak setiap warga negara.

Menurut para ahli harus ada berbagai institusi dan kondisi bila mana sistem yang dijalankan oleh suatu negara biasa disebut sebagai sebuah sistem yang demokratis. Kembali kita melihat ciri khas yang ada di bangsa Indonesia dalam mengaplikasikan model demokrasinya adalah dengan menitik beratkan pada pluralisme masyarakat yang ada, hal inilah yang kemudian mengilhami para founding father kita dengan merumuskan azas negara yakni Pancasila. Dan inilah model demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila.

¹ Drs. H. Inu Kencana Syafii, M.Si., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 129.

Salah satu faktor yang tidak bisa dipisahkan ketika berbicara tentang demokrasi adalah dengan adanya partai politik yang pada dasarnya sebagai alat/sarana untuk dapat meraih kekuasaan. Dan telah menjadi suatu aksioma didalam ilmu politik bahwa suatu negara dapat disebut demokratis apabila terdapat partai-partai politik didalamnya. Sebab, dengan kehadiran partai politik berarti adanya sebetuk pengakuan terhadap setiap warga negara dalam hal perbedaan pendapat.²

Sedangkan di Indonesia, kehadiran partai politik mempunyai sejarah yang cukup panjang, hal ini telah dimulai sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kehadiran partai politik pasca kemerdekaan bagaikan oase dipadang pasir. Dengan ditunjang oleh Maklumat Wakil Presiden Nomor X, tertanggal 3 November 1945. Puncak kehadiran partai politik tersebut adalah dengan dilaksanakannya pemilihan umum untuk pertama kalinya pada tahun 1955 yang menghasilkan pemenang yaitu, Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam perjalanan kepartaiannya menarik untuk dibahas adalah dengan adanya keinginan dari rezim yang berkuasa untuk melakukan penyederhanaan terhadap sistem kepartaian yang ada. Sikap presiden Indonesia pada saat itu Soekarno terkenal dengan anti terhadap partai politik. Salah satu ucapannya yang cukup mengesankan adalah “perlunya peleburan partai politik”. Sikap inilah yang kemudian mendasari selanjutnya untuk menyederhanakan partai politik yang ada

² Schattsneider 1942, Rostow 1970, dalam Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal 8.

pada tahun 1960-an.³ Sehingga dengan sedikitnya partai yang ada maka berbanding lurus dengan berkurangnya ideologi dan memperkecil gesekan antar ideologi yang ada.

Sementara itu setelah lengsernya Soekarno dari pucuk pemerintahan dan digantikan oleh Soeharto datanglah masa Orde Baru. Namun yang menjadi catatan disini adalah pemerintahan orde baru juga mewarisi model pemerintahan orde lama, yakni kesamaan pandangan tentang penyederhanaan kepartaian. Partai politik yang awalnya berjumlah 10 partai, setelah peristiwa G/30 S dianggap masih terlalu banyak. Oleh karena itu kebijakan yang ditempuh adalah fusi (peleburan) partai-partai yang ada.

Fusi partai politik pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1973, yang terdiri dari Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), yang kemudian partai-partai ini meleburkan diri menjadi sebuah partai yang baru dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digolongkan sebagai representasi masyarakat Islam Indonesia.

Dan kemudian dikeluarkan kembali fusi partai pada tanggal 10 Januari 1973 yang terdiri dari, Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Partai Khatolik dan Partai Kristen Indonesia yang kemudian melebur dan memunculkan nama baru yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI), mereka dikategorikan partai yang berhaluan

³ Maswadi Rauf, *Masa Depan Pembangunan Politik Indonesia: Beberapa Masalah Oraganisasi Politik*, dalam Alfian, Nazarudin Sjamsuddin (ED), *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1988, hal 38.

Nasionalis.⁴ Setelah orde baru tidak lagi berkuasa, maka dimulailah masa reformasi. Pada pemilihan umum tahun 2004 hasil perolehan suara partai Golkar menduduki peringkat teratas.

Perolehan suara partai politik peserta Pemilu untuk Pemilu anggota DPR adalah Partai Golkar memperoleh 24.480.757 (21,58%) dari total 113.462.414 suara. Kemudian menyusul PDI Perjuangan dengan perolehan 21.026.629 (18,53%), Partai Kebangkitan Bangsa (10,57%), dan Partai Persatuan Pembangunan (8,15%), Partai Demokrat (7,45%), Partai Keadilan Sejahtera (7,34%), dan Partai Amanat Nasional (6,44%).⁵

Dan pada pemilihan umum 2004 walaupun Golkar menduduki peringkat teratas dalam perolehan jumlah suara namun yang menjadi presiden adalah dari Partai Demokrat yang nota bene berada pada urutan ke-5. Dan hal ini kembali terulang pada pemilihan umum tahun 2009, dimana Partai Demokrat kembali menduduki kursi kepresidenan untuk periode 2009-2014. dan untuk kali ini Partai Demokrat yang menjadi pemenang pemilihan umum dengan mengusung pasangan Capres/Cawapres SBY-Budiono yang memperoleh suara terbanyak, yakni 73.874.562 (60,80%) dibandingkan dua pasangan Capres/Cawapres lainnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU dan KPUD maka perolehan suara sah yang masuk adalah sebanyak 121.504.481 suara. Pasangan SBY-Boediono memperoleh kemenangan di lebih dari 20 % jumlah seluruh provinsi di Indonesia. Data perolehan hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing Calon adalah: Pasangan Capres/Cawapres Megawati-

⁴ Ibid., hal 38

⁵ Sumber data, Website KPU <http://www.kpu.go.id>, dan data diolah, di akses tanggal 10-09-2009

Prabowo 32.548.105 suara sah secara nasional atau (26,79%) Pasangan Capres/Cawapres SBY-Budiono 73.874.562 suara sah secara nasional atau (60,80%), Pasangan Capres/Cawapres JK-Wiranto 15.081.814 suara atau (12,41%) suara sah secara nasional. Artinya SBY-Boediono menang mutlak dalam satu putaran saja.⁶

Menurut pandangan sejumlah tokoh di negeri ini, kemenangan partai Demokrat kedua kalinya dikarenakan “politik pencitraan” yang dikemas sedemikian rupa dengan didukung oleh besaran dana pemenangan partai ini sendiri sehingga hasilnya dapat kita lihat seperti sekarang ini. Seperti komentar dari Fotarisman Zaluchu mengenai kemengan pasangan SBY-Boediono:

”Analisis kini terhadap figur yang untuk sementara menang. SBY-Boediono diuntungkan oleh situasi eksternal dan internal. Tanpa perlu berlelah-lelah sebenarnya, SBY sebagai incumbent sukses meluncurkan berbagai program yang seolah berpihak kepada masyarakat seperti gaji ke-13, BLT, dan peresmian berbagai hal persis menjelang kompetisi. SBY-Boediono juga diuntungkan karena hasrat kekuasaan menyebabkan gempita mereka membahana ke seluruh pelosok. Pengusaha, akademisi, ilmuwan, politisi, dan berbagai elemen masyarakat, termasuk jajaran teras elit politik, tak lagi malu-malu memperlihatkan dukungan mereka terhadap keduanya. Potensi kemenangan yang dibangun dengan “citra” memperbesar gaung kemenangan yang disuarakan oleh para pendukung yang bekerja secara masif ini. Dan yang paling menguntungkan adalah SBY-Boediono memperoleh dukungan psikologis masyarakat. Masyarakat yang umumnya didominasi oleh mereka berpendidikan rendah, bersuku Jawa dan berada di Jawa, masih memiliki kelekatan dengan sosok yang berpenampilan gagah, tinggi, dan santun ketika berbicara. “Pencitraan” seperti ini kepada SBY sukses menjadi alasan mengapa masyarakat memilihnya meski tidak punya alasan atas pilihan itu.”⁷

⁶ Di akses dari Website KPU: <http://www.kpu.go.id>., dan data diolah, di akses tanggal 10-09-2009

⁷ Di akses dari Website : <http://hariansib.com>., judul artikel “Pasca Pilpres 2009” oleh Fotarisman Zaluchu, di akses tanggal 12-04-2010.

Apabila kita mengikuit model berpikir yang seperti ini maka seolah-olah partai Demokrat hanyalah partai massa yang tidak mempunyai sistem kaderisasi yang menopang internal partai ini. Namun yang harus kita ingat bahwa partai politik meniscayakan adanya individu-individu yang menjalankan dan menopang sistem organisasi dari partai sehingga dapat eksis dan bisa menjadi pemenang pemilu seperti partai Demokrat.

Didalam sebuah partai politik, kader adalah tulang punggung dan harapan masa depan partai. Oleh karena itu, pendidikan dan pembinaan kader partai menjadi kunci keberhasilan perjuangan partai. Kader-kader dari berbagai tingkatan dan berbagai kalangan merupakan andalan partai yang perlu terus menerus memperoleh perhatian peluang, kesempatan untuk mengembangkan diri didalam dan bersama partai melalui pendidikan dan pelatihan politik yang teratur, terencana dan terprogram secara sistematis. Arah pengembangan difokuskan pada kader partai yang juga sekaligus kader bangsa, yang siap bertugas dilembaga-lembaga penyelenggara pemerintah negara dan ditengah-tengah masyarakat.

Sebagai partai politik yang baru berdiri (tahun 2001), Partai Demokrat telah tumbuh menjadi salah satu partai politik yang layak untuk diperhitungkan dan disejajarkan dengan partai-partai besar seperti Golkar atau PDI P. Dan tentunya telah melakukan proses perkaderan sehingga partai ini masih tetap eksis sampai sekarang. Partai Demokrat termasuk kekuatan politik di Indonesia yang diperhitungkan oleh banyak orang, dan menjadi pemenang utama pada pemilu 2009.

Oleh Karena itu tepat kalau Partai Demokrat telah mempersiapkan program umum ke depan. Penyusunan program umum partai adalah merupakan penyiapan bingkai kerja (*frame work*) bagi jajaran dan kader partai yang senantiasa berada dalam kehidupan masyarakat pluralis. Oleh karenanya program yang disusun, seyogyanya berangkat dari geografis, geopolitik dan geoekonomi serta wawasan partai.

Secara garis besar program umum Partai Demokrat adalah sebagai berikut: Pertama, mengembangkan, memperkuat dan membina partai. Kesuksesan Partai Demokrat mengusung Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan pasangan sebagai wakilnya bapak Boedhiyono menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan sudah menjadi suatu indikator bahwa Partai Demokrat telah diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Walaupun sesungguhnya figur Bapak SBY tidak luput dari keberhasilan besar itu. Keberhasilan pelaksanaan manajemen partai politik terutama dalam mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran organisasi banyak dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi pada tingkat DPP, DPD dan DPC. Di samping itu kemampuan, loyalitas, keuletan, moralitas dan militansi seorang kader sangat diperlukan bahkan menjadi syarat utama untuk menjadi pimpinan/pengurus partai. Kader partai yang akan dibina oleh partai politik tidak hanya dipersiapkan dalam kepemimpinan partai politik, tetapi kader dalam segala lini, termasuk memimpin di masyarakat dan pemerintahan.

Manajemen partai haruslah bersih, simpatik, berwibawa, akuntabel, terbuka dan komunikatif. Pembinaan kader dimulai dari struktur organisasi yang

terendah adalah ranting (Pekarting: Pembinaan Kader Ranting, Pekarancab: Pembinaan Kader Anak Cabang, Pekercab: Pembinaan Kader Cabang, Perkarda: Pembinaan Kader Daerah, Pekapus: Pembinaan Kader Pusat). Partai telah membuat wadah koordinasi yang cukup kuat baik daerah maupun pusat untuk merekam, mendiskusikan dan mencari solusi terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, baik isu perpolitikan maupun isu pembangunan yang sedang berjalan. Wadah ini melibatkan para tokoh masyarakat, agama, dan para akademis. Untuk menjadi organisasi sosial yang kuat, dipandang perlu adanya gerakan sosial yang menarik empati masyarakat.

Memantapkan Partai Demokrat sebagai organisasi kekuatan sosial politik dalam mengembangkan kepercayaan rakyat dalam memikul dan melaksanakan tugas pembaruan dan pembangunan bagi kepentingan rakyat. Mantapnya Partai Demokrat sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang semakin bertumbuh, mengakar, berkualitas, mandiri dan demokratis sehingga lebih tanggap dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan pemantapan perwujudan kehidupan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien serta dinamis menuju Indonesia yang demokratis, sejahtera, maju dan modern dalam suasana aman, dan penuh kedamaian lahir dan batin.

Meningkatnya kemampuan dan peranan pengurus dan anggota di semua tingkatan organisasi Partai Demokrat melalui program pelatihan kepemimpinan dan wawasan nusantara bagi kader-kader Partai Demokrat. Meningkatnya peranan semua perangkat organisasi di semua tingkatan telah mewujudkan kader Partai Demokrat yang berkualitas, beriman, tidak tercemar, bermoral baik dan memiliki

militansi yang tinggi. Partai demokrat berperan pula dalam tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sasaran dan capaian sebagaimana dimaksud di atas diupayakan untuk dapat dikontinyukan melalui kegiatan-kegiatan terencana, terarah, terkoordinir dan terus menerus yang dapat dirangkum kedalam tiga aspek yaitu; Konsolidasi, Pembangunan nasional, Pemilu dan pasca Pemilu tahun 2009. Pokok-pokok program Partai Demokrat untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah meliputi konsolidasi pembangunan nasional dan pemilu tahun 2014.

Konsolidasi partai adalah segala usaha dan kegiatan yang terencana, terarah dan terpadu yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, untuk memperkuat apa yang telah dicapai dan mempersiapkan diri dalam rangka usaha mencapai tujuan bersama. Memperkokoh kesetiaan Partai Demokrat kepada ideologi Pancasila. Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang demokratis, meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, menjamin hak azasi manusia, dan terwujudnya masyarakat yang aman, adil dan sejahtera. Meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ideologi, paham dan pola pikir yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila. Konsolidasi organisasi meliputi kegiatan-kegiatan di bidang keanggotaan, kaderisasi, kelembagaan, penggalan dan pendayagunaan dana, hubungan dengan organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi serta penerangan, penerbitan dan media massa.⁸

⁸ Diakses dari <http://www.demokrat.or.id>, tanggal 7 November 2009 pukul 20.00 WIB

Pada masa reformasi seperti saat ini, partai politik diberikan kebebasan dalam menentukan ideologi partai. Ada partai politik yang mengandalkan ketangguhan ideologi yang dipilih untuk mengumpulkan massa dan dijadikan sebagai massa dari partai. Dan juga ada partai politik yang mengandalkan kekuatan kader yang dimiliki. Kekuatan kader dihimpun lewat mekanisme rekrutmen, kemudian setiap kader wajib mengikuti setiap jenjang pelatihan yang telah ditetapkan oleh partai politik tersebut.

Sesuai dengan peran partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik, maka partai politik memiliki tugas seperti berikut:

1. Menyiapkan kader-kader pimpinan politik.
2. Menyeleksi kader-kader yang dipersiapkan.
3. Memperjuangkan untuk menempatkan kader-kader yang berkualitas, berdedikasi, serta memiliki kredibilitas yang cukup tinggi.

Melihat perannya sebagai sarana rekrutmen politik, maka sudah menjadi hal yang sangat wajib bagi partai politik untuk senantiasa melakukan sebuah proses pengkaderan didalam tubuh partai itu sendiri. Rekrutmen merupakan salah satu langkah awal dan paling dasar ketika partai akan melakukan proses regenerasi didalam tubuh partai itu sendiri agar menjaga eksistensi partai kedepan.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah diatas maka, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimanakah Sistem Pengkaderan yang dilakukan Oleh Partai Demokrat D.I. Yogyakarta Periode 2006-2009?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menjelaskan secara objektif mengenai sistem pelatihan kader didalam Partai Demokrat.
- b. Mengetahui sejauh mana keberhasilan pengkaderan didalam Partai Demokrat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat dijadikan referensi dalam memahami sistem pelatihan kader partai politik.
- b. Dapat memahami pola perkaderan dan strategi partai dalam menjaga stabilitas internal partai dan demi kelangsungan partai kedepan.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum partai politik merupakan salah satu unsur yang wajib ada dalam sistem tersebut. Partai politik merupakan suatu pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan platform politik. Adapun beberapa ilmuwan mendefinisikan partai politik sebagai berikut:

1. Roger F. Soltau

Partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisirkan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.

2. Geovani Sartori

Partai politik adalah setiap kelompok politik yang dapat dikenali lewat label yang menempel pada partai politik tersebut dan mereka memiliki simbol-simbol yang biasanya muncul pada saat pemilu dan mereka mampu menempatkan calon-calon mereka dalam jabatan publik.

3. Haggue Harrop

Partai politik adalah dalam hal untuk menguasai pemerintah cukup menguasai hal-hal yang bersifat keputusan yang menentukan.

4. Jhon Canoy dan Henry

Partai politik adalah sebuah asosiasi yang dibentuk secara sukarela dan berusaha untuk mengendalikan pemerintahan dengan jalan ikut pemilihan dengan menempatkan orang-orang mereka.

5. Sthepen Tarsey

Partai politik adalah kelompok sosial yang berusaha menguasai sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah Negara dan biasanya cara-cara yang diambil lewat pemilu.

6. Carl J. Freiderich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil bagi anggotanya.⁹

⁹ Roger F. Soltau, dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grafindo, Jakarta, 1992, hal 116.

7. Raymond Girfield Gettel

Partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memakai kekuasaan bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.¹⁰

8. Mark M. Hagopian

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam rangkaian prinsip dan kepentingan ideologis melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat.¹¹

9. Miriam Budiharjo

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai yang sama, kelompok ini berusaha memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹²

b. Fungsi Partai Politik

Menurut Miriam Budiharjo, dalam Negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Politik

Proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui

¹⁰ Raymond Girfield Gettel, dalam Ulung Pribadi, *Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Politik*, UMY, 2001, hal 43.

¹¹ Mark M. Hagopian, dalam Ihlusal Amal, *Teori Mutakhir Partai Politik*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998.

¹² Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1998, hal 160-166.

pendidikan formal, non formal dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan masyarakat.

2. Rekrutmen Politik

Seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

3. Partisipasi Politik

Kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta ikut menentukan pemimpin dalam pemerintahan.

4. Memadu Kepentingan

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

5. Komunikasi Politik

Merupakan proses penyampaian informasi mengenai kondisi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah, agar terjadi keseimbangan didalam pelaksanaan proses demokratisasi didalam suatu negara yang mengenuit sistem deomkrasi.

6. Pengendalian Konflik

Mengendalikan konflik yang timbul dalam sistem politik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

7. Kontrol Politik

Kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dari isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.¹³

Dari ketujuh fungsi partai politik seperti yang telah disebutkan diatas, ada juga fungsi lainnya. Dan fungsi ini lebih dikenal oleh khalayak umum dan juga disebut sebagai fungsi utama partai politik, adapun fungsi tersebut yakni:

- a. Mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.
- b. Mengumpulkan, mengorganisasi dan merumuskan aspirasi rakyat untuk diperintahkan oleh sistem politik.
- c. Menempatkan wakil-wakil yang dipandang cakap untuk mewujudkan aspirasi rakyat.¹⁴

c. Tugas Partai Politik

1. Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Partai politik disini bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat atau khalayak, kemudian langkah selanjutnya memilih dan merumuskan serta menyerahkan kepada pemerintah untuk dapat dijadikan politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.
2. Partai politik juga mempunyai tugas untuk menyebarkan gagasan atau ide-ide yang tersimpul didalam rencana kebijaksanaan pemerintah.

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grafindo, Jakarta, 1992, hal 116-121.

¹⁴ Riswanda Imawan, *Membedah Orde Baru*, CV. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal 5.

3. Partai politik bertugas juga untuk menambahkan dan memupuk kesadaran akan rasa nasionalisme.
4. Partai politik bertugas mencari dan mengajak serta mereka yang kelihatan dan dianggap berbakat, mampu ikut serta dan relatif dalam lapangan kegiatan politik serta mendidik mereka untuk menjadi kader pemimpin.
5. Partai politik bertugas untuk mengatur pertikaian dan membantu merumuskan konflik-konflik dan selanjutnya berusaha mengatasi konflik tersebut serta mencari penyelesaiannya.¹⁵

d. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian Menurut Maurice Duverger dalam bukunya *Political Parties* demikian juga G. A. Jacobson dan M. H. Lipman dalam bukunya yang berjudul *Political Science* mengklasifikasikan sistem kepartaian dalam tiga macam sistem, yakni:

1. Sistem Partai Tunggal (*One Party System*)

Partai politik merupakan alat pemerintahan dari perhimpunan sukarela pada pemilih, sistem partai tunggal meliputi Negara yang benar-benar hanya mempunyai satu partai disamping itu juga Negara dimana ada satu partai yang dominant. Dalam Negara yang menganut sistem partai tunggal, keadaan kepartaian dalam Negara tersebut tidak bersaing atau non kompetitif, hal ini disebabkan karena partai-partai yang ada dalam negara harus menerima pimpinan dari partai yang dominan serta tidak dibenarkan untuk bersaing secara bebas dan terbuka.

¹⁵ Sulistiati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Ghalia Indonesia, [t.t], hal 113.

2. Sistem Dua Partai (*Two Party System*)

Didalam negara yang menganut sistem dua partai atau lebih maka yang memegang peranan dominan hanya dua partai saja. Dalam sistem dua partai maka dapat dibagi menjadi dua partai, yaitu partai besar yang berkuasa, karena dapat menang dalam pemilihan umum dinamakan partai mayoritas (*majority party*), partai ini memegang tanggung jawab untuk urusan-urusan umum. Sedangkan partai yang lainnya dinamakan partai minoritas (*minority party*) atau partai oposisi (*opposition party*) karena kalah dalam pemilihan umum. Partai oposisi mempunyai tugas memeriksa dengan teliti dan mengkritik pemerintah.

3. Sistem Multi Partai (*Multi Party System*)

Dalam Negara yang menganut sistem multi partai membuat iklim demokratisasi kembali menyeruak. Hal ini dikarenakan sistem multi partai dapat merepresentasikan wakil-wakil yang di inginkan oleh masyarakat. Efek yang muncul dari sistem ini adalah terdapatnya beberapa partai yang sama imbang kekuatannya. Dan masing-masing mempertahankan visinya dalam mengatasi sejumlah persoalan tertentu yang dianggap dapat meraih simpati masyarakat.¹⁶

e. Tipologi Partai Politik

Dalam pemahaman masyarakat dewasa ini terhadap partai politik pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang hanya bertujuan meraih kekuasaan dan bercengkrama, tegur sapa dengan masyarakat hanya pada saat menjelang pemilu dan dalam waktu pemilihan umum dan akan menghilang entah kemana se usai pemilihan umum.

¹⁶ Maurice Duverger, G. A. Jacobson dan M. H. Lipman, dalam Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Gala Indonesia, Yogyakarta, 1984, hal 114-115.

Ada pula yang mengatakan bahwa partai adalah kumpulan orang-orang dalam suatu organisasi partai politik yang kerjanya hanya memanipulasi rakyat untuk terwujudnya kepentingan mereka semata. Akan sangat berbeda ketika adanya transformasi pengetahuan tentang partai politik secara utuh di dalam masyarakat.

Secara teoritik dapat dipahami bahwa setiap partai politik memiliki tipologi masing-masing berdasarkan beberapa hal. Ramlan Surbakti mengatakan bahwa tipologi partai politik adalah pengklasifikasian partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti azas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Untuk lebih lanjut beliau menjelaskan tipologi partai politik sebagai berikut:

1. Azas dan Orientasi

Berdasarkan azas dan orientasinya, partai politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe. Ketiga tipe tersebut adalah partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan. Partai politik pragmatis adalah partai politik yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat pada suatu doktrin atau ideologi tertentu. Artinya perubahan waktu, situasi dan penampilan partai politik tersebut cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin. Partai ini biasanya terorganisasikan agak longgar. Namun tetap memiliki tujuan tertentu sesuai dengan misi partai tersebut.

Partai doktriner adalah partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkrit sebagai penjabaran dari ideologi yang dianut. Adeologi yang

dimaksud merupakan seperangkat nilai-nilai politik yang dirumuskan dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Pergantian kepemimpinan niscaya dapat mengubah gaya kepemimpinan, namun tidak sampai mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara kongkrit dan partai dengan tipe ini terorganisasikan secara ketat dan rapi.

Partai kepentingan merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, aliran kepercayaan tertentu dan lingkungan hidup yang secara langsung berkeinginan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan. Partai ini sering ditemukan dalam sistem multi partai, akan tetapi kadangkala terdapat pula dalam sistem dua partai namun tidak mampu berkompetisi untuk mengakomodasikan sejumlah kepentingan di dalam masyarakat.

2. Komposisi dan Fungsi Anggota

Menurut komposisi dan fungsi anggotanya partai politik dapat digolongkan menjadi dua macam, yakni partai politik massa dan partai politik kader. Partai politik massa adalah partai politik yang mengendalikan kekuatan pada jumlah anggotanya dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pada saat pemilihan umum diharapkan dapat dengan mudah memperoleh suara terbanyak dan keluar sebagai pemenang. Partai ini seringkali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat untuk berada dalam

lindungan partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-program yang pada umumnya bersifat sangat umum.

Partai politik kader adalah suatu partai politik yang mengandalkan kualitas anggotanya, keketatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber penentu yang paling utama. Seleksi anggota dan kepartaian sangat diprioritaskan, yang dapat menjadi anggota harus melalui seleksi kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta struktur organisasi partai ini sangat hierarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab masing-masing aparat partai sangatlah jelas. Karena sifatnya yang demikian maka partai politik kader sering disebut partai politik yang sangat elitis.

3. Basis Sosial dan Tujuan

Berdasarkan basis sosial dan tujuannya, maka partai politik dapat dibagi menjadi empat tipe. Pertama, partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas sosial atas, menengah, bawah. Kedua, partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok tertentu seperti, petani, buruh dan pengusaha. Ketiga, partai politik yang anggota-anggotanya merupakan pemeluk agama tertentu seperti, Islam, Protestan, Khatolik, Hindu, Budha. Keempat, partai politik bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. Dalam kenyataannya, kebanyakan partai politik tidak hanya memiliki basis sosial dari kalangan tertentu, namun terdiri dari berbagai kalangan dengan satu atau dua kelompok sebagai pihak yang dominan.

Sedangkan berdasarkan tujuannya, maka partai politik dapat di kategorisasikan menjadi tiga tipe. Pertama, partai perwakilan kelompok

masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi di parlemen. Kedua, partai pembinaan bangsa, artinya partai ini bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya meminimalisir atau bahkan menegasikan kepentingan-kepentingan yang berpandangan sempit. Ketiga, partai mobilisasi, artinya partai ini berupaya memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin partai. Sedangkan partisipasi dan keterwakilan kelompok cenderung diabaikan. Partai ini cenderung bersifat monopolistis karena hanya ada satu partai dalam masyarakat.¹⁷

f. Kategori Partai Politik Berdasarkan Fungsi

Sehubungan dengan pembahasan tentang aktualisasi partai politik maka dipandang perlu untuk menjelaskan secara lebih jauh tentang jenis-jenis partai politik yang ada di Indonesia serta bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas fungsi yang telah dijalankannya. Diharapkan nantinya dengan melihat jenis-jenis partai politik ini kita dapat mengidentifikasi kecendrungan kinerja yang nantinya akan ditampilkan oleh masing-masing partai politik yang ada di Indonesia.

1. Partai Proto

Partai proto adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini yang muncul di Eropa Barat sekitar abad tengah sampai abad ke-19. Ciri paling menonjol dari partai proto adalah perbedaan antara kelompok anggota (*ins*) dengan non-anggota (*outs*). Masih belum nampak sebagai partai politik modern, tetapi hanya merupakan faksi-faksi yang dibentuk berdasarkan peneglompokan ideologi dalam masyarakat.

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grafindo, Jakarta, 1992, hal 120-124.

2. Partai Kader

Merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto, muncul sebelum diterapkan hak pilih secara luas bagi rakyat, sehingga sangat tergantung masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi masih rendah. Ideologi yang dianut konservatisme ekstrim atau reformasi moderat, partai kader tak perlu organisasi besar yang memobilisasi massa. Contoh: PSI di Indonesia (1950-1960).

3. Partai Massa

Muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakyat, sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasional bagi perluasan hak pilih. Partai massa terbentuk di luar parlemen (extra-parlemen) dengan basis massa yang luas, seperti buruh, tani, kelompok agama, dan lain-lain, dengan ideologi yang kuat untuk memobilisasi massa dengan organisasi yang rapi. Tujuan utamanya bukan hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga memberikan pendidikan politik bagi rakyat/anggota.

Contoh: partai politik di Indonesia (1950-1960an), seperti PNI, Masyumi, PKI, dan lain-lain.

4. Partai Diktatorial

Merupakan suatu tipe partai massa tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Kontrol terhadap anggota dan rekrutmen anggota sangat ketat (selektif), karena dituntut kesetiaan dan komitmen terhadap ideologi.

Contoh: PKI dan umumnya partai komunis.

5. Partai *Catch-all*

Merupakan gabungan partai kader dan partai massa. Istilah “*catch-all*” pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan partai politik di Eropa Barat pasca Perang Dunia ke-II. *Catch-all* artinya adalah menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan umum dengan menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Aktivitas partai ini erat kaitannya dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

Contoh: Golkar di Indonesia (1971-1998).

Partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan (*interest group*) dan kelompok penekan (*pressure group*). Partai dibentuk untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon untuk jabatan publik, sementara kelompok kepentingan dan kelompok penekan lebih memilih cara persuasi, lobi, dan propaganda dalam usaha mempengaruhi pemerintah.¹⁸

g. Karakteristik Partai Politik

Maurice Duverger didalam bukunya *Political Party*, mengatakan bahwa perbedaaan karakteristik partai-partai politik guna memahami konsep partai politik itu sendiri, biasa dikatakan dengan melihat struktur dan anatomi masing-masing partai politik. Untuk dapat memahami karakteristik partai-partai politik biasa dilakukan dengan meninjau dari segi organisasi, keanggotaan ataupun aspek

¹⁸ Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., *Partai Politik Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, In-TRANS Publishing, Malang, 2008, hal 17-19.

kepemimpinannya. Dengan ini M. Duverger mencoba mengklasifikasikan partai-partai politik berdasarkan *direct structure* dan *indirect structure*.

1. *Direct Structure*

Keanggotaan seseorang dalam partai politik dilihat sebagai individu-individu yang secara langsung masuk dan mengikutkan diri dalam partai politik tertentu.

2. *Indirect Structure*

Keanggotaan seseorang dalam partai politik diperoleh berdasarkan keikutsertaannya dalam organisasi yang terikat kepada suatu partai politik tertentu, karena adanya kepentingan timbal balik.¹⁹

2. Sistem Kepartaian

Setelah Presiden Soeharto dijatuhkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998, terdapat tiga perubahan mendasar dalam mekanisme pemilu. Pertama, kembalinya “sistem multi partai” dari “sistem tripartai” dalam pemilu yang direalisasikan pada tanggal 7 Juni 1999 dengan diikuti oleh 48 partai. Kedua, pada pemilu tahun 2004, pemilu diadakan dua kali; pemilu pertama untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemilu kedua untuk memilih presiden secara langsung. Perubahan ketiga, dengan dikeluarkannya PP No. VI tahun 2005 (tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan PILKADA (pemilihan kepala daerah) secara langsung seperti yang diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004.

¹⁹ Maurice Duverger, dalam Heppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991, hal 193.

Dalam sistem multi partai, para kontestan dihadapkan pada sebuah realitas bahwa persaingan untuk mampu merebut, memuaskan, dan meyakinkan pemilih semakin ketat. Tujuan akhir dari persaingan antarpolisi dan kontestan adalah membawa pemilih ketempat pemungutan suara (TPS) sampai akhirnya mencoblos suatu partai atau kontestan. Perubahan mekanisme dan sistem pemilu di Indonesia dapat pula mempengaruhi hubungan antara kontestan (partai politik, calon presiden, atau calon kepala daerah) dengan pemilih.

3. Rekrutment Politik

Sebagai sarana rekrutmen politik (*instrument of political recruitment*), yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau kepemimpinan bangsa.²⁰ Yang kemudian dapat kita lihat dan rasakan dampaknya ketika para kader partai tersebut menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif.

a. Kaderisasi

Kemampuan sebuah partai untuk melakukan “penggemblengan” atau pematangan terhadap SDM-nya sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan para pengurusnya untuk memfasilitasi pengadaan pendidikan dan pelatihan secara intensif dibidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya. Hal ini dapat dilakukan sejauh menyangkut peningkatan kemampuan secara simultan dan terencana pada semua tingkatan kepengurusan partai.

²⁰ Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., *Partai Politik Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, In-TRANS Publishing, Malang, 2008, hal 23.

b. Sistem Pengkaderan

Sistem pengkaderan merupakan suatu sistem yang terstruktur dan berjenjang, memiliki arah dan tujuan yang jelas dan memiliki pedoman-pedoman pokok. Dari penerapan sistem pengkaderan ini secara umum mengharapkan hasil yang cukup maksimal sehingga partai politik memiliki generasi penerus.

1. Bentuk dan Jenjang Perkaderan

Perkaderan didefinisikan oleh Ivancevich (1995) adalah sebagai “usaha meningkatkan kinerja kader dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera”. Beliau mengemukakan sejumlah butir penting tentang perkaderan yang dapat kita lihat dibawah ini:

a. Perkaderan (*Training*)

Adalah sebuah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja aparat organisasi. Perkaderan terkait dengan ketrampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Perkaderan berorientasi ke masa sekarang dan membantu kader untuk menguasai ketrampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

b. Program Perkaderan Formal

Adalah usaha yang dilakukan oleh (organisasi/perusahaan) untuk memberi kesempatan kepada kader agar menguasai ketrampilan dan ilmu pengetahuan.

c. Belajar (*Learning*)

Adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak kader dalam usaha menguasai ketrampilan, pengetahuan, dan sikap tertentu yang mengakibatkan perubahan yang relatif bersifat permanen dalam perilaku kinerja mereka.

d. Ketrampilan (*Skill*)

Adalah setiap perilaku kerja yang telah dipelajari. Oleh karena itu, yang harus dicapai dalam perkaderan adalah peningkatan ketrampilan yang diperlukan. Ketrampilan yang biasanya menjadi prioritas utama perkaderan adalah ketrampilan yang bersifat motorik (menggunakan organ tubuh terutama tangan), kognitif (kemampuan yang menggunakan daya nalar atau analisis), dan verbal (menggunakan mulut atau berkomunikasi) yang juga disebut ketrampilan “interpersonal”.²¹

2. Prinsip Dasar bagi Perkaderan

Dasar didalam perkaderan merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan didalam melakukan suatu proses perkaderan. Berdasarkan pengalaman dan penelitian para ahli, ada sembilan prinsip dalam perkaderan sebagai berikut:

a. *Individual Differences*

Tiap-tiap individu mempunyai ciri khas berbeda satu dengan yang lain, baik mengenai sifat, tingkah laku, bentuk keadaannya maupun pekerjaan.

b. *Relation to Job Analysis*

Analisis jabatan mempunyai tugas utama untuk memberikan pengertian akan tugas yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan.

c. *Motivation*

Adalah suatu usaha yang dapat menimbulkan dorongan untuk melaksanakan suatu tugas.

²¹ Dr. H. Achmad S. Ruky, *Sumber Daya Manusia Berkualitas: Mengubah Visi Menjadi Realitas*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 230-231.

d. *Active Participation*

Didalam melaksanakan perkaderan (*training*) para peserta harus dapat dilibatkan langsung dalam mengambil peran dalam membicarakan mengenai apa dan bagaimana melakukan suatu pekerjaan.

e. *Selection of Trainees*

Training sebaiknya diberikan kepada mereka yang mempunyai minat dan menunjukkan bakat untuk dapat mengikuti perkaderan tersebut dengan baik.

f. *Selection Trainer*

Dalam training yang perlu diperhatikan juga adalah sumber daya manusia yang mengelola suatu perkaderan.

g. *Training of Trainer*

Seorang tenaga instruktur sebelum melakukan pekerjaannya hendaknya telah melalui suatu tahapan yakni telah mendapatkan pendidikan khusus untuk menjadi trainer.

h. *Training Methods*

Suatu perkaderan akan berhasil tidak hanya tergantung kepada tenaga trainer saja, akan tetapi juga ditentukan oleh penggunaan metode yang tepat guna.

i. *Principles of Learning*

Dalam pelatihan azas/dasar dari ilmu pengetahuan juga harus diperhatikan.²²

Dari sekian prinsip training diatas dapatlah kita gambarkan suatu model perkaderan yang cukup memadai sehingga kontinuitas dapat terjaga.

²² Wahyudin Sumpeno, *Sekolah Masyarakat, Penerapan Rapid-Training-Design dalam Pelatihan berbasis Masyarakat*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, hal. 99.

3. Metode Perkaderan

Menurut Prof. Koentjoroningrat metode (*methodis*) adalah suatu cara atau jalan sehubungan dengan uapaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja yaitu memahami objek yang menjadi sasaran.²³ Jadi metode perkaderan adalah suatu metode yang digunakan dalam pelaksanaan perkaderan.

Menurut Drs. Moekijat bahwa metode perkaderan itu banyak sekali jumlahnya dan tidak satupun metode yang paling baik bila dibandingkan dengan metode yang lain.²⁴ Oleh karena itu metode-metode yang digunakan dalam suatu perkaderan disesuaikan dengan jenis perkaderan yang akan diberikan kepada perorangan atau kelompok. Menurut Drs. Manullang metode perkaderan dapat dibagi menjadi tiga model yakni:

a. Metode Kuliah

Metode kuliah adalah proses penyampaian informasi dan pengertian dari perkaderan kepada peserta perkaderan dalam waktu yang relatif singkat. Metode ini dapat sangat efektif, kurang efektif maupun dapat juga membosankan peserta. Hal ini tergantung dari sumber daya manusia yang menjadi trainer.

b. *Case Method* dan *Incident Method*.

Case Method adalah suatu metode dimana para peserta diberikan suatu kasus untuk dipecahkan dan dianalisa. Kasus yang digunakan untuk merangsang topik-topik diskusi dan dari semua jenis seperti simulasi, kasus sederhana, ataupun kompleks.

²³ Prof. Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1983.

²⁴ Moekijat, *Evaluasi Latihan Bagi Pegawai*, Sinar Baru, Bandung, 1992.

Incident Method adalah suatu metode dimana para peserta diberikan suatu kasus dalam bentuk laporan tertulis yang pendek, kemudian keterangan selanjutnya dicari oleh peserta sendiri dengan mengajukan pertanyaan kepada pelatih atau seseorang yang telah ditentukan untuk memberikan informasi. Kemudian peserta diminta untuk memecahkan masalah tersebut dan mengambil keputusan.

Perbedaan antara *Case Method* dan *Incident Method* adalah dalam *Case Method* peserta diberikan gambaran masalah 80%, sedangkan pada *Incident Method* peserta hanya diberikan gambaran masalah 25% saja. Selebihnya dicari sendiri oleh peserta. Sedangkan kelemahan keduanya adalah:

1. Pemakaian kasus lama kurang baik, karena keadaan terjadinya kasus tersebut telah berbeda pada saat kasus tersebut diberikan dalam pelatihan.
2. Tidak segera dapat mengetahui efektivitas dari metode tersebut.

c. *Simulation Method*

Simulation Method adalah metode dimana para peserta pelatihan lebih memainkan peranan dalam suatu organisasi. Sebagian peserta menjadi pengamat dari peran yang dimainkan oleh peserta yang lain. Adapun jenis simulasi terdiri dari tiga model yakni:

1. *Management Game*

Yaitu peserta diminta memainkan peran sebagai manajer dari suatu organisasi tiruan dan kemudian berdasarkan data yang telah disiapkan, kemudian peserta diminta mengambil keputusan. Dapat juga peserta dibagi dalam beberapa grup, kemudian disediakan keterangan-keterangan, dan grup-grup tersebut harus

mengambil keputusan sebelum permainan selesai, lalu diadakan presentasi dari masing-masing grup.

2. *In Basket Exercise* atau *in Tray Exercise*

Yaitu para peserta dilatih ketrampilannya dalam memisahkan mana yang penting dan mana yang tidak ketika dihadapkan didalam suatu masalah. Kemudian peserta mengambil dapat keputusan yang cepat dan tepat dalam waktu yang relatif singkat.

3. *Role Playing*

Suatu model simulasi yang digunakan dalam *human relation training* gunanya adalah untuk pengembangan keahlian *human relation*.

4. Evaluasi Pertrainingan

Evaluasi pertrainingan merupakan tahapan didalam suatu perkaderan yang memfokuskan pada pemantauan hasil-hasil dari suatu perkaderan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Adapun beberapa tahapan didalam melakukan evaluasi terhadap pertrainingan adalah sebagai berikut:

a. Keefektifan Pelaksanaan Pertrainingan

Evaluasi jenis ini adalah evaluasi yang termasuk kategori tahap pertama dan hanya untuk mengukur bagaimana reaksi peserta terhadap perkaderan, kemampuan instruktur, kepanitiaan, dan penilaian peserta keseluruhan. Cara yang biasa digunakan adalah meminta para peserta untuk mengisi quisioner yang berisi beberapa pertanyaan tentang reaksi dan kesan mereka atas penyelenggaraan perkaderan tersebut. Pertanyaan biasanya berkisar seputar topik-topik yang telah

dibahas apakah relevan atau tidak, bagaimana kemampuan pengajar dalam melakukan tugasnya, dan aspek-aspek kepanitiaan.

b. Penyerapan/Retensi Materi

Kegunaan evaluasi pada tahap ini adalah untuk mengukur sampai sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Pengukuran biasanya dilaksanakan dalam bentuk tes pasca perkaderan yang dilakukan menjelang hari-hari terakhir dari perkaderan.

c. Dampak Perkaderan pada Perilaku Kerja.

Manfaat dilakukannya evaluasi pada tahap ini adalah untuk mengukur tingkat perubahan perilaku kerja yang terjadi setelah mereka mengikuti perkaderan. Apakah perilaku kerja telah berubah seperti yang diharapkan dan seberapa besar derajat perubahan tersebut. Evaluasi pada tahap ini harus dilakukan oleh atasan langsung dari kader yang telah mengikuti perkaderan dengan mencatat perubahan-perubahan tersebut. Evaluasi juga bisa dilaksanakan dengan meminta dari pelanggan yang dilayani oleh karyawan tersebut atau oleh “pelanggan internal”, yaitu karyawan atau pejabat lain dalam perusahaan yang juga dilayani oleh karyawan tersebut.²⁵

E. Defenisi konsepsional

Defenisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan tentang pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam melakukan penerapan teori pada skripsi ini.

²⁵ Dr. H. Achmad S. Ruky, *Sumber Daya Manusia Berkualitas: Mengubah Visi Menjadi Realitas*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 248-249.

Adapun defenisi konsepsional yang digunakan didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Partai Politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh warga negara secara sukarela yang mempunyai tujuan, cita-cita dan orientasi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan serta memperjuangkan kepentingan anggotanya.
2. Rekrutmen Politik merupakan proses seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.
3. Kaderisasi adalah Kemampuan sebuah partai untuk melakukan 'penggemblengan' atau pematangan terhadap SDM-nya (kader).
4. Sistem Pengkaderan adalah suatu pola yang teratur dan terencana sertan kontinyu dalam pengkaderan.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah rincian indikator yang berguna sebagai panduan dalam mengumpulkan data dilapangan. Dalam penelitian tentang sistem pengkaderan Partai Demokrat, indikatornya adalah:

1. Sistem Pengkaderan disini meliputi:
 - a. Bentuk Perkaderan yang terdiri dari;
 - Perkaderan Formal
Merupakan perkaderan yang bersifat terstruktur dan berjenjang dan memiliki pedoman/petunjuk pelaksanaan perkaderan.
 - Perkaderan Non Formal

Merupakan perkaderan yang bersifat pembinaan dan pengembangan ketrampilan, keahlian, dan atau profesi anggota kader partai.

- Perkaderan Informal

Merupakan perkaderan Informal bersifat sebagai tempat pengimplementasian dari hasil yang telah diperoleh setiap kader dari perkaderan Formal dan Non Formal seperti kepanitiaan.

b. Jenjang dan Tujuan Perkaderan yang meliputi;

- Jenjang Perkaderan

Adalah sebagai usaha meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

- Tujuan Perkaderan

Membentuk suatu sistem kerja individu/kader yang terstruktur dan bisa diukur tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam proses perkaderan.

2. Metode Perkaderan Meliputi:

a. Ceramah

Metode yang digunakan dalam perkaderan sebagai sarana penyajian informasi yang bersifat satu arah (monolog).

b. Diskusi

Metode perkaderan yang memfokuskan para peserta perkaderan untuk melakukan pertukaran pengetahuan, gagasan, dan pendapat secara bebas.

c. Mentaplan

Metode dalam perkaderan yang lebih banyak menggunakan media/alat peraga untuk melihat sejauh mana kapasitas pengetahuan peserta.

d. Studi Kasus

Merupakan metode dalam perkaderan yang menekankan pada pengkajian suatu masalah oleh para peserta sehingga muncul suatu solusi awal dari masalah yang telah disuguhkan.

3. Evaluasi dan Follow Up Pelatihan

a. Evaluasi

Merupakan pengamatan perkaderan dan penilaian yang dilakukan secara sadar dan terencana terhadap proses pelatihan sebagai usaha untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.

b. Follow Up (Rencana Tindak Lanjut)

Adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah proses pelaksanaan perkaderan akan berakhir, guna merancang kegiatan tindak lanjut kepada para peserta pasca pelatihan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif, adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti dimana pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data dan informasi yang diperoleh melalui keterangan dari pihak-pihak yang kompeten dan berpengaruh terhadap masalah yang ada dalam penelitian ini serta pihak-pihak terkait didalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang berkompeten ini adalah pihak atau individu yang mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi didalam DPW Partai Demokrat D. I. Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai catatan, buku-buku, artikel-artikel ilmiah, koran, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan bersumber pada arsip-arsip resmi yang berhubungan dengan pengkaderan Partai Demokrat itu sendiri. Dalam menguji keabsahan data, dapat digunakan tehnik triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Atau lebih jelasnya tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan dalam pemeriksaan melalui sumber lain. Pemeriksaan keabsahan data ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dengan dokumen yang berkaitan.

b. Wawancara

Tehnik wawancara (interview) adalah cara pengumpulan data melalui kontak langsung antara pengumpul data dengan sumber data yang dikenal dengan

sebutan responden.²⁶ Merupakan metode untuk memperoleh data dengan cara mewawancarai secara langsung para responden yang mempunyai kewenangan sehubungan dengan pengkaderan di dalam partai demokrat, responden yang diwawancarai adalah pengurus harian DPD Partai Demokrat. Mereka adalah Zulfitri Adli, S.H, mas Prayitno, Drs. Wagimin, Kolonel (purn) Sukedi.

4. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisis data tehnik yang digunakan adalah tehnik kualitatif, yaitu menganalisa masalah tanpa menggunakan data statistik atau matematis dengan menggunakan analisa isi agar dapat mendapat jawaban yang ilmiah, logis, dan empiris. Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada, yang muncul dan yang terjadi dari data dari data-data yang terkumpul tanpa penghitungan statistik.²⁷

Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah analisa deskriptif yang diperoleh dari pengklarifikasian data yang kemudian digambarkan melalui susuna kalimat untuk memperoleh kesimpulan, selanjutnya adalah menganalisa objek sesuai dengan gejala objek yang diteliti lalu menginterpretasikan data dan dasar teori yang ada. Data yang akan dianalisis adalah data yang diperoleh dari wawancara tentang pengkaderan partai, dokumen resmi Partai Demokrat tentang pengkadferan partai, untuk keabsahan penelitian.

²⁶ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989, hal 110.

²⁷ Noeng Muhajdir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1989, hal 71.